



SUKAWARSINI DJELANTIK
(Editor)

ASIA PASIFIK

**Konflik, Kerja Sama, dan Relasi
Antarkawasan**



10-7-15
UNPAR IAIN

Asia-Pasifik
Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan

No. Klass 327 ASI
No. Induk 139729 Tgl 9-7-15
Hadiah/~~Self~~
Dari Ibu S. Djelantik

ASIA-PASIFIK

Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan

SUKAWARSINI DJELANTIK, Ph. D (Ed.)



327

ASI

139729 - R15B / FISIP

9.7.15

Universitas Katolik Parahyangan
dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2015

Asia Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan/Sukawarsini
Djelantik; ed.1-Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015

xx + 396 hlm.: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-979-461-940-7

Judul:

Asia Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan

© 2015 Sukawarsini Djelantik (Ed.)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan atas kerja sama Universitas Katolik Parahyangan dan
Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Anggota IKAPI DKI Jakarta

Edisi pertama: Mei 2015

Y.O.I: 833.33.17.2015

Desain sampul: Iksaka Banu

Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230

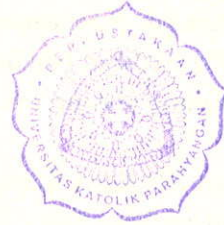
Telepon: 021-31926978, 3920114

Faksimile: 021-31924488

email: yayasan_obor@cbn.net.id

website: www.obor.or.id

DAFTAR ISI



Daftar Isi	v
Kata Pengantar	xi
Bagian I: Asia Pasifik Pasca Perang Dingin: Tinjauan Umum	1
1. Kawasan Asia-Pasifik Pasca Perang Dingin Sukawarsini Djelantik	3
2. Kekuatan Nuklir, Militerisme, dan Peran AS di Asia Pasifik Sukawarsini Djelantik	19
3. Jepang sebagai Raksasa Ekonomi Dunia Sukawarsini Djelantik	53
4. Politik Luar Negeri Jepang di Kawasan Asia-Pasifik: <i>Global Ordinary Power?</i> Mardohar B.B Simanjuntak	73
5. Munculnya Negara-negara Industri Baru (NICs): Kasus Korea Selatan dan Taiwan Sukawarsini Djelantik	89
Bagian II: Konflik Antarnegara Intrakawasan	109
6. Peta Konflik di Asia-Pasifik Sukawarsini Djelantik	111
7. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terkait Konflik Laut Cina Selatan Timotius Triswan Larosa	139
8. Konflik Disintegrasi di Papua: Kompromi Kepentingan dalam Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia	165

Olivia Idris Rumlatur	
9. Peran ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Thai-Kamboja Kasus Candi Preah Vihear	185
Sina Mao	
10. Konflik di Semenanjung Korea: Solusi Damai atas Kepemilikan Nuklir Korea Utara	201
Kyung Hyung Lee	
Bagian III: Kerja Sama Intrakawasan	221
11. Reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan	223
Suasti Atmastuti Astaman	
12. Kerja Sama Myanmar-Tiongkok	257
Anvar Gafurov	
13. Kerja Sama Indonesia-Timor Leste dalam Mengelola Persoalan Batas Negara	271
Vivi Pusvitasary	
14. Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Kesiapan Indonesia	289
Taufan Hendarsyah Akbar	
15. Kerja Sama Negara-negara <i>Five Eyes</i> dan Pengawasan Global	307
Giri Alam Wigunnara	
Bagian IV: Hubungan Antarkawasan Asia-Pasifik dan Afrika	319
16. Bantuan Luar Negeri Tiongkok untuk Pembangunan Infrastruktur Kenya	321
Elizabeth Ndembei	
17. Kerja Sama Sino-Kongo 2000-2013: Bahan Baku untuk Tiongkok dan Infrastruktur untuk Kongo Brazzaville	343
Nsadi Hekassoukini Vivaldi Aide Dirami	
Daftar Referensi	359
Indeks	387
Tentang Penulis	393

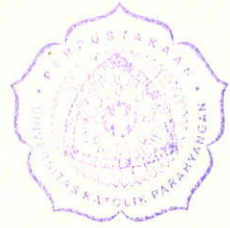


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pangkalan Militer AS di Asia Tenggara	6
Gambar 2. Kawasan Asia Pasifik	20
Gambar 3. Kekuatan Militer AS di Pasifik Barat	48
Gambar 4. Peta Jepang	58
Gambar 5. Zaibatsu dalam perekonomian Jepang	62
Gambar 6. Pangkalan Militer AS di Okinawa, Jepang	67
Gambar 7. Peta Papua New Guinea	112
Gambar 8. Lokasi Penambangan Emas PT Freeport	119
Gambar 9. Dividen, Royalti, dan Pajak dari PT Freeport Indonesia	121
Gambar 10. Laut China Selatan	124
Gambar 11. Peta Filipina	130
Gambar 12. Kepulauan Sipadan-Ligitan	135
Gambar 13. Gugusan Pulau dalam Kepulauan Spratly	142
Gambar 14. <i>Setting</i> Strategis Awal	158
Gambar 15. <i>Setting</i> Strategis Baru yang Dibentuk melalui Kebijakan AS	160
Gambar 16. Peta Indonesia dan Australia	167
Gambar 17. Candi Preah Vihear	187
Gambar 18. Peta Wilayah Sengketa	188
Gambar 19. Wilayah Sengketa	189
Gambar 20. Negara-negara Anggota Pembicaraan Enam-Pihak	205
Gambar 21. Uji coba nuklir dan tes rudal jarak jauh Korea Utara	208
Gambar 22. Negara-negara Anggota ASEAN	292
Gambar 23. Jaringan Kabel Bawah Laut SEA-ME-WE-3	310
Gambar 24. Dua metode dalam pengumpulan informasi	312
Gambar 25. Jalan Raya Kenya-Sudan	334

Gambar 26. Jalan Thika menghubungkan Nairobi-Thika	335
Gambar 27. Jalan Baru Nairobi-Kenya	336
Gambar 28. Jalur Kereta Api Dalam Kota Nairobi	337
Gambar 29. Aktivitas Pengapalan di Pelabuhan Mombasa	338
Gambar 30. Bagan Kerja Sama Sino-Kongo: Bahan baku vs Infrastruktur	353

DAFTAR TABEL



Tabel 1. Perkembangan Sengketa Teritorial Laut Cina Selatan	144
Tabel 2. Produksi Minyak dan Gas Alam dari Pengeboran di Laut Cina Selatan	147

DAFTAR PETA

Peta 1. Jaringan pipa minyak dan gas trans-Myanmar milik China	263
Peta 2. Rute lalu lintas laut melalui Selat Malaka	264
Peta 3. Peta signifikansi Selat Malaka	265
Peta 4. Perbatasan RI-Timor Leste	277

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, maka penyusunan buku *Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan* ini dapat terlaksana.

Penyusunan buku ini berawal dari keprihatinan karena minimnya buku-buku referensi terkait Hubungan Internasional secara umum, atau kajian Kawasan Asia-Pasifik secara khusus. Seperti juga yang dialami oleh topik perkuliahan lain pada program studi Hubungan Internasional, referensi yang tersedia sangat sedikit. Kalaupun ada, lebih banyak ditulis dalam bahasa Inggris dengan sudut pandang yang sangat Amerika atau Eropa sentris. Maka kehadiran buku ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dan kebutuhan akan buku-buku referensi, selain untuk memberikan sudut pandang bagaimana Indonesia memandang berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di kawasan.

Proses penyusunan buku ini melewati sebuah perjalanan yang panjang, yang mencakup hampir dua dekade. Materi berawal dari bahan-bahan perkuliahan, diskusi, dan kemudian dilengkapi dengan seminar pada kelas pascasarjana, program Magister Ilmu Sosial (MIS), khususnya program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan.

Pentingnya Kawasan Asia Pasifik bagi Indonesia tidak dapat dipungkiri; sebagai jati-diri dan sebagai mitra kerja sama dan konflik. Signifikansi lainnya yaitu, karena kawasan ini meliputi wilayah yang terluas dari segi wilayah, dengan sifat yang sangat heterogen dan pertumbuhan ekonomi yang beragam. Kawasan ini memiliki negara-negara dengan pendapatan per kapita terbesar seperti AS dan Jepang, diikuti dengan negara-negara industri baru dan calon-calon negara industri baru dengan pertumbuhan

ekonomi yang menakjubkan. Selain itu, dari segi luas dan keberagaman, kawasan ini memiliki Asia Timur dan Asia Tenggara, yang termasuk *Pacific Basin* (Ceruk Pasifik). Sub-kawasan Asia Timur terdiri atas Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Asia Dalam seperti Manchuria, Mongolia, Xinjiang, Tibet, Hongkong, dan Taiwan. Termasuk pula Korea, Jepang, dan Siberia Timur (sekarang masuk Federasi Rusia). Asia Tenggara memiliki dua bagian besar yakni Asia Tenggara Daratan dan Asia Tenggara Kepulauan; Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar termasuk Asia Tenggara Daratan, sementara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina adalah Asia Tenggara Kepulauan. Masuk juga Kawasan Oceania; Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Kepulauan Pasifik. Di Amerika Utara, Kanada, dan Amerika Serikat, dan di Amerika Selatan, termasuk Chile dan Meksiko.

Luasnya wilayah kajian serta dinamika sosial-ekonomi, politik, dan keamanan yang berkembang di kawasan Asia-Pasifik menjadikan tantangan tersendiri bagi aktor-aktor di kawasan untuk mengelola konflik dan kerja sama. Ditambah lagi dinamika yang terus berkembang menyebabkan pembahasan selalu menemukan dimensi-dimensi baru untuk dikaji lebih lanjut. Sistematika pembahasan dalam buku ini akan dibagi atas tiga bagian besar: konflik, kerja sama, dan relasi antarkawasan. Bagian yang ketiga secara spesifik membahas Kawasan Afrika: suatu wilayah yang paling sedikit dibahas dalam kajian-kajian Ilmu Hubungan Internasional di Indonesia. Bukan saja karena posisinya yang relatif jauh, tetapi juga interaksi antar aktor-aktor negara dan non-negara yang relatif jarang jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan dunia lainnya.

Pembahasan mengenai Asia-Pasifik tidak dapat menegasikan pengaruh dan peranan Amerika Serikat (AS) yang besar dalam konflik dan khususnya kerja sama. Baru setelah era Perang Dingin berakhir (dekade 1990-an), pengaruh AS relatif melemah meskipun tidak pudar, digantikan oleh menguatnya aktor-aktor lain seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Jepang, terutama dalam bidang ekonomi. Perubahan fokus pembahasan dari faktor geopolitik ke geoekonomi ini pula yang menyebabkan dua artikel mengenai kerja sama antar-kawasan, khususnya dengan dua negara di Afrika (Kongo dan Kenya), didominasi pembahasan terkait peran RRT dalam bidang pembangunan ekonomi di kedua negara tersebut.

Bagian pertama pembahasan terkait hubungan antara AS dan negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang telah terjalin sejak akhir Perang Dunia Kedua. Pangkalan-pangkalan militer yang berdiri di kawasan ini selama Perang Dingin merefleksikan peran AS sebagai penyedia payung keamanan di kawasan. Akan tetapi, perubahan geostrategis dan geopolitik menjadi geoekonomi menyebabkan peranan pangkalan-pangkalan militer tersebut tidak signifikan era Perang Dingin. Maka dilatarbelakangi kenyataan ini, strategi AS dewasa ini berubah dengan menerapkan kebijakan "keseimbangan kembali". Tujuannya selain memperkuat kedudukan dan peran AS, juga untuk mencegah semakin menguatnya peran dan kedudukan RRT di kawasan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan pengaruh dilakukan misalnya melalui peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral, dan keterlibatan dalam forum-forum ASEAN atau APEC. Selain itu, peran AS juga dapat ditinjau dari keterlibatan dalam berbagai pertemuan seperti perundingan enam pihak untuk mengatasi permasalahan nuklir di Semenanjung Korea.

Bagian pertama membahas Kawasan Asia-Pasifik pada era Perang Dingin: suatu periode ketegangan politik dan militer antara dunia Barat, yang dipimpin oleh AS dan sekutu NATO-nya, dengan dunia Komunis, yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Periode yang terjadi antara tahun 1945-1991 dinamakan Perang Dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung, namun masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Perang Dingin juga mengakibatkan ketegangan tinggi yang pada akhirnya memicu konflik militer regional.

Tulisan mengenai Jepang sebagai raksasa Ekonomi Dunia membahas peran Jepang yang sangat signifikan dalam bidang ekonomi. Pasca kehancuran pada akhir Perang Dunia II tidak menyebabkan Jepang terpuruk, melainkan kembali muncul sebagai kekuatan dominan dalam bidang ekonomi, sejajar bahkan dalam beberapa kasus lebih besar daripada negara-negara industri Barat yang telah maju terlebih dahulu. Tulisan pada bagian ini membahas berbagai faktor pendukung kemunculan Jepang sebagai kekuatan ekonomi dunia; mencakup kebijakan pemerintah, program industrialisasi, sampai dukungan keamanan dari Amerika Serikat (AS).

Tulisan keempat membahas politik luar negeri Jepang di Kawasan Asia-Pasifik, oleh Mardohar B. B Simanjuntak. Tulisan membahas prospek penerapan model Jerman dalam teori siklus 15 tahunan yang diajukan oleh dua penulis yaitu Inoguchi dan Bacon. Kedua pengamat menyimpulkan bahwa model yang paling tepat bagi Jepang adalah model Inggris, yakni Jepang menjadi mitra erat Amerika Serikat (AS) yang lebih leluasa bergerak dalam menunjukkan kekuatannya dalam bidang ekonomi dan militer. Namun demikian, krisis ekonomi parah yang terjadi di AS dekade tahun 2000 memberikan celah diskusi bagi peluang Jepang untuk mempergunakan model Jerman yang lebih berperan di kawasan Asia-Pasifik. Hubungan Jepang-ASEAN digunakan sebagai alat uji kekuatan Jepang terhadap kawasan yang sudah 40 tahun berhubungan erat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Jepang belum sanggup berbuat banyak, tidak seperti Jerman yang sanggup menjadi jangkar ekonomi sebuah kawasan.

Tulisan kelima bertajuk *Munculnya Negara-negara Industri Baru* (NICs), dengan mengambil studi kasus Korea Selatan dan Taiwan. Kemunculan NICs memicu kekaguman dunia, sehingga banyak ahli yang mencoba memahami faktor-faktor di balik keberhasilan dalam membangun perekonomian negara-negara tersebut pasca Perang Dunia II. Salah satu hal yang menghubungkan keempat negara ini adalah penerapan nilai-nilai Konfusianisme. Perhatian terhadap peran Konfusianisme berubah pada dekade tahun 1960-an ketika beberapa Negara (Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Hongkong) mengalami modernisasi ekonomi yang pesat. Nilai-nilai Konfusius secara positif mendukung perkembangan ekonomi, sebagai peletak dasar kehidupan sosial dan budaya, yang membuat program-program pembangunan berjalan lancar. Fungsinya secara umum memberikan sikap positif bagi rakyat, dorongan untuk mengejar pendidikan, dan arahan bagi peran pemerintah. Ajaran-ajaran Konfusius juga menyediakan dasar psikologis dan moral untuk melegalisir kebijakan dan program-program ekonomi. Hasilnya adalah keajaiban ekonomi negara-negara di Asia Timur, atau seringkali disebut sebagai “macan Asia”.

Bagian kedua berjudul *Konflik Antarnegara Intrakawasan*. Secara khusus membahas peta konflik di kawasan. Bagian ini diawali dengan pembahasan mengenai ideologi etnonasionalisme, atau perasaan kesukuan

yang berlebihan, sebagai faktor utama suksesi dan konflik yang tidak bisa dihindarkan dalam politik internasional. Nasionalisme etnis juga seringkali dipakai sebagai dasar dan bentuk perjuangan. Konflik-konflik yang terjadi di beberapa negara kawasan Asia-Pasifik seringkali disebabkan oleh etnonasionalisme ini. Konflik semakin memperjelas peran kelompok-kelompok etnis dalam pembentukan gerakan politik, khususnya dalam suksesi. Konflik lainnya berhubungan dengan masalah perbatasan negara, terutama akibat dari warisan masa kolonialisme. Konflik-konflik tersebut disertai dengan tuntutan untuk memerdekakan diri untuk lepas dari negara induk. Pembahasan secara khusus mengenai konflik Bougainville di Papua New Guinea (PNG), Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Indonesia, Perebutan wilayah di Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut China Selatan, dan masalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dalam kasus Kepulauan Sipadan-Ligitan.

Bagian ketujuh membahas mengenai kebijakan luar negeri AS terkait konflik Laut Cina Selatan oleh Timotius Triswan Larosa. Argumen yang mendasari adalah kemajuan ekonomi yang tinggi dan krisis ekonomi dan energi dunia, telah mendorong negara-negara mencari pemenuhan kebutuhan energinya. Masing-masing negara berupaya mencari sumber minyak bumi untuk dieksploitasi. Salah satu upaya dari negara-negara di sekitar perairan Laut Cina Selatan, khususnya yang berdekatan dengan Kepulauan Spratly, adalah memperluas wilayah melalui klaim pulau-pulau dan perairan yang berdekatan. Konflik kepemilikan ini menimbulkan sengketa teritorial yang mengarah pada konflik bersenjata antarnegara, seperti antara Cina dengan Vietnam dan Filipina, Malaysia dengan Filipina.

Bagian kedelapan membahas konflik disintegrasi di Papua oleh Olivia Idris Rumalutur. Argumen yang diajukan adalah bagaimana kompromi kepentingan terjadi dalam hubungan diplomatik Indonesia-Australia. Kompromi tersebut dipengaruhi oleh konflik antara Papua dengan Indonesia. Australia, yang gencar melakukan intervensi menyangkut konflik dan memberikan dukungan secara terang-terangan untuk mendukung gerakan disintegrasi. Tujuan Australia adalah mendapatkan simpati dan berusaha mendapatkan keuntungan dari tanah Papua. Intervensi menjadikan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia memanas. Namun hal

ini pada akhirnya memunculkan kesepakatan baru dan hubungan yang semakin harmonis. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan yaitu apakah telah terjadi kompromi kedua negara terkait kepentingan masing-masing di Papua. Kekayaan alam Papua yang melimpah merupakan alasan utama Papua menjadi bahan perebutan dan juga untuk menunjang perekonomian dalam negeri Indonesia dan juga kepentingan bagi perusahaan-perusahaan Australia di Papua.

Artikel kesembilan membahas peran ASEAN dalam penyelesaian Konflik Thailand dengan Kamboja khususnya dalam kasus perebutan Candi Preah Vihear, oleh Sina Mao. Pembahasan mengenai kegagalan ASEAN menangani sengketa kepemilikan candi karena ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik. Uraian juga termasuk sejarah konflik dan klaim kedaulatan yang diawali tahun 1962 ketika Mahkamah Internasional tidak menjabarkan dengan jelas batas-batas wilayah. Masalah politik kedua negara juga menyebabkan sejarah tentang konflik perbatasan terulang kembali.

Artikel selanjutnya berjudul *Konflik di Semenanjung Korea: Solusi Damai atas Kepemilikan Nuklir Korea Utara*, oleh Kyung Hyung Lee. Membahas pembicaraan enam pihak berada pada keadaan kritis antara kembali ke dilema ketidakamanan dunia atau dan maju ke arah keamanan bersama. Penting untuk memahami tentang hal yang menyebabkan kebuntuan yang dihadapi saat ini dan apa yang dapat membantu kita untuk maju. Makalah ini menganalisis upaya-upaya diplomasi yang telah dilakukan untuk denuklirisasi Semenanjung Korea dalam rangka mengidentifikasi akar penyebab kegagalan dan cara untuk mengatasinya.

Bagian ketiga mengenai kerja sama intra kawasan, diawali dengan pembahasan mengenai reunifikasi antara Korea Utara-Selatan, oleh Suasti Atmastuti Astaman. Proses reunifikasi hingga tahun 2013 belum membawa hasil karena beberapa alasan, salah satunya keterlibatan AS. Terdapat lima alasan mengapa AS menjadi faktor penghambat, pertama kuatnya aliansi AS-Korea Selatan yang bertujuan untuk melindunginya di Semenanjung Korea dan Kawasan Asia-Pasifik. Alasan kedua, paksaan terhadap Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi yang dibalas dengan aksi-aksi provokatif. Alasan ketiga adalah pemberlakuan kebijakan politik

luar negeri khusus yang dikenal dengan nama “Strategic Patience Policy” (Kebijakan Kesabaran Strategis). Alasan keempat, munculnya dilema keamanan diantara AS, Korea Utara, dan Cina sebagai dampak dari keberadaan kekuatan militer AS di Korea Selatan. Alasan kelima, pelanggaran terhadap piagam reunifikasi nasional melalui campur tangan tidak langsung dalam pembuatan kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara.

Kerja Sama Myanmar-Tiongkok dibahas oleh Anvar Gafurov. Argumen yang diajukan adalah, RRT sebagai negara dominan yang baru, perlu menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga seperti Myanmar. Letak geografis Myanmar merupakan faktor utama pendukung kepentingan geopolitik Tiongkok. Keinginan Tiongkok adalah memperluas lingkup kerja sama, memperkuat hubungan baik antar negara tetangga, menjaga perdamaian dan stabilitas di perbatasan, serta mengurangi biaya transportasi yang dikeluarkannya.

Kerja Sama Indonesia-Timor Leste dalam Mengelola Batas Wilayah, diulas oleh Vivi Pusvitasary. Persoalan perbatasan darat yang unik, karena terdiri dari dua bagian. Pertama, perbatasan di sekitar Oecusse yaitu suatu *enclave* (daerah kantung) yang merupakan bagian wilayah kedaulatan Timor Leste yang berada di Timor Barat (yang merupakan bagian wilayah RI di Nusa Tenggara Timur) dan terpisah sekitar 60 kilometer dari wilayah induknya. Kedua, perbatasan di sepanjang 149,9 km yang membelah pulau Timor menjadi Timor Barat di barat dan Timor Leste di bagian timur. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002 hingga 2012, kedua negara masih dihadapkan pada berbagai permasalahan krusial yang menyangkut perbatasan darat seperti pembangunan sosial-ekonomi, lingkungan dan pertahanan-keamanan. Potensi konflik ini terjadi akibat persaingan kedua negara dalam memperoleh sumber daya alam dan tumpang-tindih klaim atas batas-batas teritorial di daerah perbatasan. Pengelolaan perbatasan melalui *first track diplomacy* yang menekankan peran negara dalam mengadakan perundingan dan menandatangani kesepakatan batas negara.

Topik ke-13 membahas *Kesiapan Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, disusun oleh Taufan Herdansyah Akbar. Sebagai realisasi pembentukan ME, ASEAN mengesahkan Bali Concord II yang

berdasarkan tiga pilar, yaitu komunitas keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*), komunitas ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan komunitas sosial-budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*). Namun pada 2007, AEC dipercepat pada 2015. Pembahasan terfokus pada kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015, dengan menguraikan proses terbentuknya AEC 2015, kondisi Indonesia dan kemudian strategi-strategi persiapan. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia belum siap menghadapi AEC 2015 ditinjau dari segi infrastruktur, suprastruktur, birokrasi, daya saing, permodalan, dan kekuatan ekspor. Namun, kondisi tersebut dapat diperbaiki dengan melaksanakan strategi-strategi seperti meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan daya saing, dan mereformasi birokrasi agar memudahkan calon-calon investor. Sosialisasi yang baik serta koordinasi antara pemerintah dan swasta juga diperlukan agar AEC 2015 ini menjadi peluang bagi Indonesia.

Kerja Sama Negara-negara "Five Eyes" dan Pengawasan Global, oleh Giri Alam Wigunnara membahas publikasi dokumen rahasia milik Badan Keamanan Nasional (BKN) AS oleh Edward Snowden. Publikasi mengungkap bagaimana AS dan 4 negara lainnya, yaitu Australia, Inggris Raya, Kanada, dan Selandia Baru ("Five Eyes"), membangun kerja sama berupa pembagian data intelijen (*intelligence sharing*) hasil program pengawasan (*surveillance*) oleh dunia digital. Pasca publikasi, sektor ekonomi banyak mengalami kerugian, selain krisis kepercayaan terhadap AS sebagai rumah bagi banyaknya perusahaan-perusahaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) raksasa seperti AT&T dan Cisco. Kebocoran dokumen dan informasi rahasia yang telah menjadi konsumsi publik adalah ancaman atas keamanan negara, karena program pengawasan yang tengah berlangsung adalah salah satu cara untuk meminimalisir ancaman seperti terorisme. Kelompok teroris selalu tampil dengan perekrutan yang massal dan umumnya bersifat terbuka meski dalam operasi gerilya juga menggunakan gerakan bawah tanah. Tulisan ini menjawab pertanyaan bagaimana pengawasan global diakomodasi oleh negara "Five Eyes".

Bagian IV berisi *Hubungan Antar-Kawasan: Asia-Pasifik dan Afrika*, membahas bagaimana bantuan luar negeri RRT berpengaruh positif bagi pembangunan infrastruktur Kenya. Artikel mencoba menjawab apakah

kepentingan RRT di Kenya sesuai dengan Visi Pembangunan Kenya 2030. Kajian termasuk perdagangan, bantuan, dan kegiatan usaha bisnis RRT di Afrika dan Kenya. Pinjaman dan hibah dari RRT naik signifikan setelah tahun 2002 ketika pemerintahan baru terpilih. RRT menjadi mitra dagang terbesar kedua di Afrika yang juga memiliki program bantuan yang luas untuk semua negara-negara Afrika yang mengakui Taiwan di bawah yurisdiksi RRT. Program bantuan pinjaman, infrastruktur, pertanian, kesehatan, bantuan pendidikan, pertukaran budaya, dan dukungan militer. Saat ini aktivitas bisnis dan pedagang RRT sangat masif di benua Afrika. Banyak orang Cina yang terlibat dalam penjualan barang murah setiap hari, sementara bisnis lainnya telah terlibat dengan eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam. Aktifitas ini menjadi sulit diabaikan dan telah memicu perdebatan panas tentang sifat dari kemitraan ini dan apa sebenarnya motif RRT. Fokus tulisan adalah apakah dampak dari perjanjian/kerja sama akan menghambat atau mendukung tujuan pembangunan Kenya.

Kerja Sama Sino-Kongo 2000-2013: Bahan Baku untuk RRT dan Infrastruktur untuk Kongo Brazzaville, disajikan oleh Nsadi Hekassoukini Vivaldi Aide Dirami yang membahas kerja sama Sino-Kongo dari tahun 2000 hingga 2013 dan menunjukkan prosedur perjanjian antara RRT dan Kongo yang menitikberatkan kepada kebutuhan kedua negara. Tulisan ini memfokuskan bahan baku yang berasal dari Kongo dan pembangunan infrastruktur di wilayah Kongo dengan bantuan pinjaman dari RRT melalui pendirian perusahaan-perusahaan RRT. Kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional besar RRT sangat luar biasa dan mengerahkan berbagai bidang termasuk infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam. Mengingat posisinya sebagai mitra pertama Kongo Brazzaville dalam ekspor minyak, tulisan ini menunjukkan bahwa ada saling ketergantungan nyata antara kedua negara meskipun dalam hubungan saling ketergantungan, selalu ada pihak yang mendapat keuntungan lebih banyak. RRT membutuhkan bahan baku untuk industrinya dan Kongo Brazzaville membutuhkan infrastruktur modern untuk perkembangan ekonomi-sosialnya.

Bandung, 5 Juli 2015

Dr. Sukawarsini Djelantik

Bagian I

*Asia-Pasifik Pasca Perang Dingin:
Tinjauan Umum*

1

KAWASAN ASIA-PASIFIK PASCA PERANG DINGIN

Sukawarsini Djelantik

Perang Dingin merupakan periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara Dunia Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya, dengan Dunia Komunis, yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Periode itu terjadi antara tahun 1945-1991. Peristiwa ini dinamakan Perang Dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung, namun masing-masing pihak memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran besar. Perang Dingin juga mengakibatkan ketegangan tinggi yang pada akhirnya memicu konflik militer regional. Tulisan ini akan meninjau situasi di kawasan Asia-Pasifik setelah berakhirnya Perang Dingin. Akhir periode ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, dan pada akhirnya menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan militer yang dominan di dunia, sehingga merubah konstelasi politik internasional yang cukup signifikan, termasuk di Kawasan Asia-Pasifik. Selama periode Perang Dingin dan berbagai peristiwa yang menyertainya telah menimbulkan dampak besar bagi Kawasan Asia-Pasifik (Aspas). Berakhirnya Perang Dingin menyebabkan perubahan, terutama terkait peran aktor-aktor utama seperti AS, Cina, dan Jepang. Perubahan juga terjadi dalam peran Rusia terutama dalam kaitannya dengan Korea Utara, Indo China, dan negara-negara anggota ASEAN. Tulisan ini akan menjelaskan perubahan-perubahan global setelah berakhirnya Perang Dingin yang membawa implikasi pada kawasan.

Untuk lebih memahami politik internasional kawasan, akan dibahas pula perspektif teoritis.

Berakhirnya Perang Dingin

Perang Dingin berpengaruh besar dikawasan Aspas, meskipun arena utamanya terletak di Eropa. Perang Dingin diawali oleh AS dengan menjalankan politik pembendungan (*containment policy*) seperti tertuang dalam Doktrin Truman yang disampaikan pada tanggal 12 Maret 1947.¹ Konteks yang lebih luas adalah situasi umum di Eropa setelah Perang Dingin. Semasa Perang Dingin, posisi Uni Soviet dominan di Eropa Timur selain mengontrol dan menduduki kawasan Jerman Timur.² Memang negara-negara Eropa Barat merupakan negara-negara demokratis, tapi rentan terhadap tekanan Uni Soviet karena kondisi ekonomi dan kekuatan politik dari partai-partai komunis lokal. Maka doktrin pembendungan menjadi komitmen AS untuk melawan setiap usaha perluasan pengaruh Uni Soviet. Doktrin Truman diikuti dengan pengumuman *Marshall Plan* pada bulan Juni 1947 dan pembentukan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) pada tahun 1949.

Meskipun Eropa merupakan aktor utama Perang Dingin, tetapi imbasnya terasa ke kawasan Asia Pasifik. Contohnya, perang saudara antara kelompok Komunis dan Nasionalis di China juga terkait dengan Perang Dingin meskipun awalnya AS tidak mengintervensi atau memutuskan untuk mendukung kelompok Nasionalis, akan tetapi telah memberikan bantuan kepada Chiang Kai Shek. Kebijakan AS juga dimaksudkan untuk menghukum Jepang pada awal pendudukannya di China. Selanjutnya AS melakukan berbagai pendekatan yang menjadikan Jepang benteng utama politik pembendungan. Setelah kemenangan Komunis di China Daratan pada tahun 1949, upaya-upaya untuk membendung Asia dari pengaruh Komunis diarahkan terutama untuk melawan RRC. Hal ini diperkuat

1 Doktrin Truman mengacu pada pidato oleh Presiden Harry S. Truman pada tanggal 12 Maret 1947 yang berisi usulan AS untuk memberikan bantuan. Doktrin ini dipicu oleh situasi di Yunani dan Turki. Lihat: <http://www.yale.edu/lawlab/avalon/trudoc.htm>, diakses tanggal 15 Maret 2005.

2 Derek McDougall, *The International Politics of the New Asia-Pacific*, Lynne-Rienner Publisher, 1997, hal. 3.

dalam Perang Korea pada bulan Juni 1950 yang sebenarnya merupakan konflik lokal, tapi dipandang AS sebagai bagian dari Perang Dingin. Setelah berakhirnya perang Korea tahun 1953, Korea Selatan tetap dipertahankan sebagai salah satu pangkalan militer AS di Aspas.

Bentuk keterlibatan AS dalam Perang Dingin di Asia Tenggara sangat menonjol di Filipina dengan adanya pangkalan militer di Subic dan Clark. Di Vietnam, politik pembendungan ditunjukkan dengan pemberian dukungan kepada Perancis dalam perang melawan kelompok Viet Minh yang berideologi Komunis setelah tahun 1950. AS juga enggan mengakui kesepakatan Jenewa pada tahun 1945 yang memberi dasar penyelesaian konflik, bahkan membentuk SEATO (*South East Asia Treaty Organization*), sebuah organisasi kawasan anti-Komunis.³

Sejak tahun 1965, AS terlibat dalam perang besar melawan pemerintahan Saigon di Vietnam. Ketika AS gagal mencapai tujuan di Vietnam, pemerintah Richard Nixon membentuk pangkalan militer baru di Camh Ranh dan Da Nang, sebagai salah bagian dari strategi AS di Asia Pasifik.⁴ Doktrin Guam tahun 1969 menyatakan bahwa AS tidak akan terlibat langsung dalam perang di kawasan di masa mendatang. Pada saat bersamaan doktrin ini menjadi upaya mengakomodasi Cina, yang sebelumnya dipandang sebagai musuh utama AS di Aspas.⁵ Penandatanganan Komunike Shanghai pada tahun 1972 menjadi simbol baru hubungan kedua negara.

Berikut ini adalah ilustrasi dari keberadaan pangkalan-pangkalan militer AS di Asia-Tenggara.

3 <http://www.history.com/this-day-in-history/seato-established>, diakses tanggal 13 Januari 2014.

4 Carroll H. Dunn, *Vietnam Study, Base Development in South Vietnam 1965-1970*, Department of the Army, WashingtonDC, 1991, lihat di: <http://www.history.army.mil/books/Vietnam/basedev/chapter5.htm>, diakses tanggal 13 Januari 2014.

5 Heiko Meiertöns, *The Doctrines of US Security Policy: An Evaluation Under International Law*, Cambridge University Press, hal. 142-144.



U-Tapao Royal Thai Navy Airfield, Thailand

Used by the U.S. military as a major staging base for flights to Vietnam during the 1960s and 1970s. U.S. and Thailand now considering a joint military center to respond to natural disasters in the region.

Cam Ranh Bay, Vietnam

Served as vital naval and air base for the United States during the Vietnam War, later became a major Soviet installation. U.S. Navy ships can now visit to re-supply and make repairs, but Pentagon would like more regular access.

Subic Bay Naval Base and Clark Air Force Base, Philippines

Largest U.S. bases in Asia for much for the 20th century until evicted by the Philippines two decades ago. U.S. Navy has increased ship visits in recent years. Philippines now signalling it is open to greater access.

Gambar 1. Pangkalan Militer AS di Asia Tenggara⁶

6 U.S. eyes return to some Southeast Asia military bases, Washington Post, 25-6-2012. Lihat di: <http://www.sino-us.com/34/152315630.html>, diakses tanggal 15 Januari 2014.

Sementara terjadi perubahan-perubahan strategi AS di Aspas, pemerintah Richard Nixon membentuk *détente* pada tingkat yang lebih luas dengan Uni Soviet (US). Kesepakatan *Strategic Arms Limitation Treaty* (SALT I) yang ditandatangani tahun 1972 berisi pengaturan persenjataan nuklir AS dan US antarbenua, selain sebagai upaya menstabilisasi kerja sama nuklir dua negara.⁷ Peretujuan Helsinki tahun 1973 dan *Ostpolitik* Jerman Barat pada awal tahun 1970-an juga berjasa menurunkan ketegangan di Eropa.⁸ Tapi pada akhir tahun 1970-an, *détente* ini berubah dengan meningkatnya kembali ketegangan Perang Dingin. Intervensi US di Afganistan pada akhir tahun 1979 merupakan bukti nyata menurunnya hubungan AS-US. Selanjutnya, Presiden AS Ronald Reagan yang memulai pemerintahan tahun 1981, secara tegas menyatakan perang melawan “kerajaan Setan” Uni Soviet.

Di Kawasan Aspas, Perang Dingin “baru” memaksa terjalannya kerja sama antara China-AS. Kepedulian terhadap ekspansi US membuat China dan AS mempunyai lebih banyak kesamaan kepentingan. Intervensi Vietnam di Kamboja pada akhir tahun 1978 merupakan upaya intervensi AS untuk menggulingkan rezim Polpot. Selanjutnya Vietnam dipandang sebagai aliansi US, terutama oleh China. Dalam dasawarsa berikutnya, China, AS, dan negara-negara ASEAN bersama-sama menentang intervensi Vietnam atas Kamboja.

Akhir Perang Dingin sering diasosiasikan dengan munculnya pemimpin US Michail Gorbachev pada tahun 1985.⁹ Komitmen Gorbachev untuk meningkatkan demokratisasi (melalui program *Glasnost* dan *Perestroika*) telah melunturkan dominasi US di Eropa Timur. Terlepas dari komitmen untuk mempertahankan pemerintahan Komunis, beberapa negara Eropa Timur mengalami transisi menuju pemerintahan pasca Komunisme sampai tahun 1989. Simbol Perang Dingin yang paling nyata, Tembok Berlin, runtuh

7 Negosiasi antara AS-US mengenai pembatasan persenjataan nuklir dikenal sebagai *Strategic Arms Limitation Talks* (SALT I) dimulai pada bulan November 1969 dan berakhir pada bulan Januari 1972. Kesepakatan dituangkan ke dalam dua dokumen: *the Anti-Ballistic Missile Treaty* (ABM Treaty) dan *the Interim Agreement on the Limitation of Strategic Offensive Arms*. Keduanya ditandatangani pada tanggal 26 Mei, 1972. <http://www.atomicarchive.com/Treaties/Treaty9.shtml>, diakses tanggal 18 Maret 2005.

8 Lihat:<http://www.country-studies.com/germany/ospolitik>, diakses tanggal 18 Mei 2005.

9 Lihat:<http://www.country-studies.com/germany/ospolitik>, diakses tanggal 18 Mei 2005. *Persian Gulf War*, lihat di: <http://www.history.com/topics/persian-gulf-war>, diakses tanggal 14 Januari 2014.